

**PERAN FASILITAS PEMERINTAH DAN AKSES PERMODALAN
TERHADAP PENDAPATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH LOGAM
DI DESA NGINGAS, SIDOARJO**

Alvazaki Ikbar Maulana

Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ikbarmaulana2004@gmail.com

Arga Christian Sitohang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
argasitohang@untag-sby.ac.id

ABSTRACT.

This study examines how government facilities and access to capital shape the income earned by metal-based small and medium industries (SMEs) in Ngingas Village, Waru Subdistrict, Sidoarjo Regency. A quantitative survey approach was used, drawing on the entire population of 76 metal IKM operators through saturated sampling so that no separate sampling procedure was required. Data were collected with a structured questionnaire and processed using multiple linear regression in SPSS, preceded by validity and reliability testing of all indicators. The results indicate that government facilities exert a positive and significant influence on IKM income ($t = 4.267$, sig. < 0.001), and that access to capital likewise contributes positively and significantly ($t = 3.626$, sig. < 0.001). Tested simultaneously, both variables significantly affect income ($F = 21.451$, sig. < 0.001), with a coefficient of determination of 0.370, meaning the two predictors jointly explain 37.0 percent of income variation while the remaining 63.0 percent stems from factors outside the model. These findings suggest that strengthening government assistance programs and easing the pathway to formal financing are both necessary, mutually reinforcing levers for raising the welfare of metal artisans in Ngingas.

Keywords: *Fasilitas Pemerintah, Akses Permodalan, Pendapatan, Industri Kecil Menengah Logam, Sidoarjo.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana fasilitas yang disediakan pemerintah dan kemudahan akses permodalan berperan dalam membentuk tingkat pendapatan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) logam di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei, melibatkan seluruh populasi sebanyak 76 pelaku IKM logam melalui teknik sampel jenuh sehingga tidak diperlukan prosedur penarikan sampel tersendiri. Data dihimpun melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, didahului dengan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap seluruh indikator. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa fasilitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IKM (t hitung = 4,267; sig. < 0,001), demikian pula akses permodalan yang turut memberikan kontribusi positif dan signifikan (t hitung = 3,626; sig. < 0,001). Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan (F hitung = 21,451; sig. < 0,001), dengan koefisien determinasi sebesar 0,370 yang berarti kedua prediktor mampu menjelaskan 37,0 persen variasi pendapatan, sedangkan 63,0 persen sisanya dipengaruhi faktor di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan program bantuan pemerintah dan kemudahan akses pembiayaan formal merupakan dua pengungkit yang saling melengkapi dan sama-sama diperlukan untuk mendorong kesejahteraan pengrajin logam di Ngingas.

Kata Kunci: *Fasilitas Pemerintah, Akses Permodalan, Pendapatan, Industri Kecil Menengah Logam, Sidoarjo.*

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak pernah lepas dari peran sektor industri kecil dan menengah, yang selama ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjadi penopang pendapatan masyarakat di tingkat akar rumput. Berbeda dengan industri berskala besar yang cenderung padat modal, Industri Kecil dan Menengah (IKM) justru tumbuh dari keterampilan turun-temurun dan modal sosial masyarakat setempat, sehingga ketahanannya terhadap guncangan ekonomi relatif lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa IKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan Produk Domestik Bruto (Tambunan, 2012).

Salah satu kawasan yang merepresentasikan dinamika tersebut adalah Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang dikenal luas sebagai sentra kerajinan dan industri logam. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, tercatat sekitar 76 unit usaha IKM logam beroperasi di kawasan ini, mengolah bahan baku logam menjadi beragam produk mulai dari alat pertanian, perlengkapan bangunan, suku cadang kendaraan, hingga aksesoris industri. Skala usaha yang relatif kecil namun jumlahnya yang banyak menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kantong ekonomi rakyat yang strategis bagi Kabupaten Sidoarjo, sekaligus menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.

Meskipun memiliki potensi besar, perjalanan usaha para pengrajin logam di Ngingas tidak selalu mulus. Sebagian pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan dalam memanfaatkan program-program bantuan pemerintah, baik karena minimnya informasi, rumitnya prosedur, maupun karena program yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Padahal, dukungan pemerintah idealnya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Mankiw (2018) yang menempatkan pemerintah dalam tiga peran utama, yaitu regulator, stabilisator, dan fasilitator. Dukungan tersebut dapat berwujud pelatihan

keterampilan, bantuan alat produksi, kemudahan perizinan usaha, hingga fasilitasi pemasaran, baik secara konvensional maupun digital.

Selain faktor fasilitas pemerintah, persoalan permodalan masih menjadi tantangan klasik yang dihadapi hampir seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak terkecuali IKM logam di Ngingas. Banyak pengrajin yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena persyaratan administratif yang dianggap memberatkan, seperti jaminan dan legalitas usaha. Sebagai jalan keluar, sebagian dari mereka beralih ke sumber pembiayaan informal yang meski lebih mudah diakses, namun membebani usaha dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi. Kondisi semacam ini sejalan dengan temuan Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) yang menyebut keterbatasan akses pembiayaan sebagai salah satu kendala struktural utama bagi pertumbuhan usaha kecil, khususnya di negara-negara berkembang.

Ketimpangan dalam pemanfaatan fasilitas pemerintah dan keterbatasan akses permodalan pada gilirannya berpotensi menghambat peningkatan pendapatan pelaku IKM logam. Pendapatan sendiri merupakan indikator paling konkret dalam menilai keberhasilan suatu usaha, karena mencerminkan hasil akhir dari seluruh proses produksi dan penjualan yang dijalankan (Sukirno, 2016). Ketika fasilitas pendukung dan modal usaha tersedia secara memadai, pelaku IKM memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan pada akhirnya mendongkrak penerimaan usaha. Sebaliknya, keterbatasan pada kedua aspek tersebut berisiko menjaga pelaku usaha tetap berada pada skala produksi yang stagnan.

Penelitian-penelitian terdahulu sesungguhnya telah banyak menyentuh tema keterkaitan antara dukungan pemerintah, permodalan, dan pendapatan UMKM, namun konteks dan lokus penelitian yang digunakan umumnya berbeda dengan karakteristik sentra industri logam berbasis rumah tangga seperti di Ngingas. Sebagai misal, kajian Umma (2022) di Sidoarjo lebih menyoroti aksesibilitas permodalan bersama peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia, sementara penelitian Rahmah et al. (2020) di Wonosobo menempatkan peran pemerintah sebagai variabel moderasi, bukan variabel bebas yang berdiri sendiri. Kekosongan kajian empiris yang secara spesifik menguji peran simultan fasilitas pemerintah dan akses permodalan pada sentra IKM logam berskala rumah tangga inilah yang mendasari urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisis pengaruh fasilitas pemerintah dan akses permodalan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pendapatan pelaku IKM logam di Desa Ngingas, Sidoarjo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemberdayaan IKM yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkaya kajian akademik di bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sektor usaha kecil dan menengah berbasis komunitas.

B. KAJIAN TEORITIS

Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah dipahami sebagai unit usaha produktif yang dijalankan secara mandiri oleh perorangan atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah, dan memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan Produk Domestik Bruto (Tambunan, 2012). Definisi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menempatkan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar. Keunggulan IKM terletak pada fleksibilitasnya dalam merespons perubahan pasar, sebuah karakteristik yang sulit ditandingi oleh unit usaha berskala besar dengan struktur organisasi yang lebih kaku.

Dari sisi tujuan, keberadaan IKM diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggerakan aktivitas produksi dan distribusi barang maupun jasa di tengah masyarakat. IKM juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi pada masa krisis, karena karakteristiknya yang lebih fleksibel dibandingkan usaha besar membuatnya lebih mudah beradaptasi (Munthe et al., 2023). Kinerja IKM sendiri umumnya diukur melalui beberapa indikator, antara lain jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap, nilai produksi, serta nilai investasi yang tertanam dalam usaha tersebut (Tambunan, 2012).

Perkembangan IKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ketersediaan modal, kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan kapasitas inovasi, sementara faktor eksternal meliputi kondisi pemasaran, akses terhadap pembiayaan, kebijakan pemerintah, serta lingkungan usaha secara umum (Subanar, 2001). Kedua kelompok faktor ini saling berkelindan dalam menentukan keberlangsungan dan daya saing IKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Fasilitas Pemerintah

Fasilitas pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan daya saing pelaku usaha, baik melalui bantuan langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka tata kelola perekonomian, pemerintah berperan sebagai regulator, stabilisator, sekaligus fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Mankiw, 2018). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015), yang menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi menjadi krusial, terutama dalam menopang sektor usaha kecil melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha rakyat.

Sejumlah aspek turut menentukan efektivitas fasilitas pemerintah bagi pelaku UMKM maupun IKM. Aspek pertama adalah ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jalan, pasar, listrik, air bersih, dan sarana produksi, yang memudahkan proses distribusi dan pemasaran. Aspek kedua berupa kemudahan akses permodalan melalui bantuan modal, Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun subsidi pembiayaan. Aspek ketiga adalah pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup keterampilan teknis, manajemen usaha, dan digitalisasi pemasaran. Aspek keempat adalah kemudahan perizinan usaha, dan aspek kelima berkaitan dengan dukungan promosi dan pemasaran melalui pameran maupun bazar UMKM (Kotler & Armstrong, 2016).

Mengacu pada kerangka tersebut, indikator fasilitas pemerintah dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam empat dimensi, yaitu fasilitas permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitas perizinan dan legalitas usaha, serta penyediaan infrastruktur sarana usaha (Salam & Prathama, 2022). Keempat dimensi ini dipandang cukup representatif untuk menangkap ragam bentuk dukungan pemerintah yang selama ini dirasakan oleh pelaku IKM logam di lapangan.

Akses Permodalan

Modal merupakan unsur produksi yang menentukan keberlangsungan suatu usaha, baik yang bersumber dari kekayaan sendiri maupun dari pinjaman pihak lain (Kasmir, 2016). Tanpa ketersediaan modal yang memadai, pelaku usaha akan kesulitan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan usaha, maupun melakukan inovasi produk. Persoalan keterbatasan akses pembiayaan, sebagaimana dijelaskan Beck dan Demirgüç-Kunt (2006), kerap menjadi hambatan struktural yang menghalangi perkembangan usaha kecil, terutama di negara-negara berkembang yang sistem keuangan formalnya belum sepenuhnya inklusif.

Kemampuan pelaku usaha dalam mengakses permodalan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingkat pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap prosedur kredit dan pengelolaan keuangan, pengalaman usaha yang mencerminkan stabilitas dan tingkat risiko di mata pemberi modal, besaran omzet usaha yang memengaruhi kepercayaan lembaga keuangan, serta kepatuhan administrasi dalam hal legalitas usaha (Anita et al., 2021). Semakin lengkap aspek-aspek tersebut dipenuhi oleh pelaku usaha, semakin besar pula peluang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Indikator akses permodalan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fasilitas permodalan, ketersediaan lembaga pembiayaan, tingkat suku bunga pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman, persyaratan agunan atau jaminan, serta besarnya jumlah kredit yang dapat diterima oleh pelaku usaha (Bank Indonesia, 2023). Keenam indikator ini mencerminkan baik aspek ketersediaan maupun kemudahan dalam memperoleh sumber pembiayaan.

Pendapatan

Pendapatan merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan suatu usaha, karena mencerminkan hasil akhir dari rangkaian kegiatan produksi dan penjualan yang dijalankan dalam periode tertentu. Pendapatan dapat dipahami sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh individu atau perusahaan sebagai balas jasa atas faktor produksi yang dipergunakan dalam aktivitas ekonomi (Sukirno, 2016). Definisi yang relatif serupa juga dikemukakan oleh Samuelson dan Nordhaus (2010), yang memandang pendapatan sebagai aliran uang yang diterima individu atau perusahaan dalam periode tertentu sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang dijalankannya.

Tingkat pendapatan suatu usaha dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya besaran modal usaha, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan, lama usaha berjalan, serta tingkat penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran (Mankiw, 2018). Sementara itu, untuk mengukur capaian pendapatan, penelitian ini menggunakan lima indikator, yaitu peningkatan jumlah penjualan, peningkatan

omzet usaha, peningkatan keuntungan usaha, stabilitas pendapatan, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya (Mankiw, 2018).

Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian empiris terdahulu memberikan landasan yang relevan bagi penelitian ini. Umma (2022) meneliti pengaruh aksesibilitas permodalan, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kualitas SDM terhadap pendapatan UMKM di Sidoarjo, dan menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Sementara itu, Rahmah et al. (2020) di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa modal, lokasi usaha, dan teknologi berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM, dengan peran pemerintah mampu memoderasi pengaruh modal namun tidak memoderasi pengaruh lokasi usaha dan teknologi.

Pada konteks yang lebih luas, Prasannath et al. (2024) mengkaji dampak kebijakan dukungan pemerintah, baik finansial maupun non-finansial, terhadap orientasi kewirausahaan dan kinerja UKM, dan menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha, salah satunya melalui peningkatan orientasi kewirausahaan. Sejalan dengan itu, Ayuni et al. (2025) di Kecamatan Sindue menemukan bahwa modal sendiri dan Kredit Usaha Rakyat secara signifikan meningkatkan pendapatan UMKM, dengan kedua sumber pendanaan tersebut saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan usaha.

Studi lain dari Chowdhury et al. (2022) terhadap UKM di Bangladesh menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan eksternal berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja, sementara aktivitas ekspor justru memberikan pengaruh negatif. Adapun Amalia (2018) pada sentra batik di Kabupaten Tegal menemukan bahwa bantuan modal dan pengelolaan usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, sementara pelatihan secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berbagai temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara dukungan pemerintah, akses permodalan, dan pendapatan usaha kecil bersifat kontekstual, sehingga pengujian pada sentra industri logam Ngingas menjadi relevan untuk memperkaya khazanah bukti empiris yang ada.

Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Fasilitas pemerintah merupakan bentuk intervensi kebijakan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja usaha, mencakup bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan, kemudahan perizinan, hingga akses pasar. Semakin optimal fasilitas tersebut dimanfaatkan, semakin besar pula peluang pelaku IKM untuk meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya mendorong pendapatan usaha. Atas dasar pemikiran tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1: Fasilitas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IKM logam di Ngingas, Sidoarjo.

Akses permodalan mencerminkan kemampuan pelaku usaha memperoleh sumber dana, baik dari lembaga formal maupun informal, untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar, sehingga

berdampak pada peningkatan pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2: Akses permodalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IKM logam di Ngingas, Sidoarjo.

Fasilitas pemerintah dan akses permodalan diduga tidak hanya berpengaruh secara terpisah, melainkan juga saling menguatkan dalam memengaruhi pendapatan IKM. Program pemerintah seperti KUR dan subsidi bunga dapat mempermudah pelaku usaha memperoleh pembiayaan, sementara pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan literasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3: Fasilitas pemerintah dan akses permodalan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan IKM logam di Ngingas, Sidoarjo.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan menguji pengaruh dua variabel bebas, yaitu fasilitas pemerintah (X1) dan akses permodalan (X2), terhadap satu variabel terikat berupa pendapatan IKM logam (Y). Lokasi penelitian berada di sentra IKM logam Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang dilaksanakan pada rentang waktu Mei hingga Juli. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku IKM logam yang terdaftar di Desa Ngingas, berjumlah 76 unit usaha. Mengingat jumlah populasi yang relatif terjangkau, penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga responden yang terlibat berjumlah 76 pelaku usaha.

Data dikumpulkan melalui dua jalur, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner terstruktur, serta data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo sebagai gambaran umum profil pelaku usaha. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing indikator variabel fasilitas pemerintah, akses permodalan, dan pendapatan usaha.

Variabel fasilitas pemerintah (X1) diukur melalui empat indikator, yakni fasilitas permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitas perizinan dan legalitas usaha, serta penyediaan infrastruktur sarana usaha. Variabel akses permodalan (X2) diukur melalui enam indikator, yaitu fasilitas permodalan, ketersediaan lembaga pembiayaan, tingkat suku bunga pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman, persyaratan agunan atau jaminan, serta besarnya jumlah kredit yang diterima. Adapun variabel pendapatan IKM (Y) diukur melalui lima indikator, yaitu peningkatan jumlah penjualan, peningkatan omzet usaha, peningkatan keuntungan usaha, stabilitas pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan operasional usaha.

Sebelum dianalisis lebih lanjut, seluruh item kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel, di mana suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's

Alpha, dengan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha melebihi 0,60.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS, mengikuti persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$, di mana Y menyatakan pendapatan IKM logam, α adalah konstanta, β_1 dan β_2 masing-masing merupakan koefisien regresi untuk fasilitas pemerintah dan akses permodalan, sedangkan ε adalah komponen kesalahan acak (error). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menilai pengaruh parsial setiap variabel bebas, uji F untuk menilai pengaruh simultan kedua variabel bebas, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan pada uji t dan uji F mengikuti taraf signifikansi 0,05, di mana hipotesis diterima apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Ngingas terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota Surabaya di sisi utara. Posisi geografis yang berdekatan dengan Surabaya memberi keuntungan tersendiri bagi pelaku IKM logam, terutama dalam hal kemudahan memperoleh bahan baku, tenaga kerja, informasi pasar, serta akses distribusi produk ke berbagai daerah. Kawasan ini dikenal luas sebagai “Kampung Logam” karena keberadaan industri pengolahan logam rumah tangga yang telah berlangsung secara turun-temurun, dengan dominasi penggunaan lahan berupa permukiman yang terintegrasi dengan kegiatan bengkel produksi.

Dari sisi demografis, mayoritas penduduk usia produktif di Ngingas menggantungkan mata pencaharian pada sektor pengolahan logam, baik sebagai pemilik usaha maupun tenaga kerja produksi. Keterampilan mengolah logam yang diwariskan antargenerasi menjadikan masyarakat setempat memiliki kemampuan teknis yang relatif matang, meski dari sisi tingkat pendidikan formal sebagian besar pelaku usaha hanya menempuh jenjang pendidikan menengah.

Karakteristik Responden

Dari 76 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, distribusi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama usaha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	69	90,79
Perempuan	7	9,21
Total	76	100,00

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaku usaha IKM logam di Ngingas didominasi laki-laki, yakni sebanyak 69 orang atau 90,79 persen, sedangkan responden

perempuan hanya berjumlah 7 orang atau 9,21 persen. Pola ini cukup wajar mengingat karakteristik usaha pengolahan logam yang menuntut kekuatan fisik dan keterampilan teknis tertentu, sehingga secara historis lebih banyak digeluti oleh laki-laki.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah	Persentase (%)
25–34 tahun	18	23,68
35–44 tahun	28	36,84
45–54 tahun	24	31,58
55–64 tahun	6	7,90
Total	76	100,00

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang 35–44 tahun (36,84%), diikuti kelompok usia 45–54 tahun (31,58%), kelompok usia 25–34 tahun (23,68%), dan kelompok usia 55–64 tahun (7,90%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pelaku IKM logam di Ngingas berada pada usia produktif, sehingga secara teoritis memiliki energi dan kapasitas kerja yang relatif baik untuk mengembangkan usahanya.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1–5 tahun	19	25,00
6–10 tahun	23	30,26
11–15 tahun	14	18,42
16–20 tahun	12	15,79
> 20 tahun	8	10,53
Total	76	100,00

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Dari sisi lama usaha, kelompok dengan masa berusaha 6–10 tahun mendominasi dengan proporsi 30,26 persen, diikuti kelompok 1–5 tahun (25,00%), 11–15 tahun (18,42%), 16–20 tahun (15,79%), dan lebih dari 20 tahun (10,53%). Sebaran ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Ngingas sudah

memiliki pengalaman yang cukup matang dalam menjalankan bisnis pengolahan logam, meski masih didominasi oleh usaha generasi pertengahan yang belum genap satu dekade beroperasi.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas terhadap seluruh item pernyataan pada ketiga variabel penelitian, yakni fasilitas pemerintah, akses permodalan, dan pendapatan, menunjukkan bahwa seluruh nilai *r* hitung berada di atas nilai *r* tabel sebesar 0,2257, dengan rentang nilai *r* hitung antara 0,419 hingga 0,745. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

Hasil pengujian reliabilitas turut memperkuat kelayakan instrumen, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Keterangan
Fasilitas Pemerintah	0,766	0,60	Reliabel
Akses Permodalan	0,876	0,60	Reliabel
Pendapatan	0,747	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026.

Ketiga variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, masing-masing sebesar 0,766 untuk fasilitas pemerintah, 0,876 untuk akses permodalan, dan 0,747 untuk pendapatan. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga dapat diandalkan untuk mengukur ketiga variabel secara berulang pada kondisi yang relatif serupa.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 17,584 + 0,419X_1 + 0,219X_2$$

Tabel 5. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Konstanta	17,584	—	—
Fasilitas Pemerintah (X1)	0,419	4,267	<0,001
Akses Permodalan (X2)	0,219	3,626	<0,001

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026.

Nilai konstanta sebesar 17,584 menunjukkan bahwa apabila fasilitas pemerintah dan akses permodalan diasumsikan tetap atau bernilai nol, maka pendapatan IKM logam berada pada level 17,584 satuan. Koefisien regresi variabel

fasilitas pemerintah sebesar 0,419 menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan satu satuan pada variabel fasilitas pemerintah akan mendorong kenaikan pendapatan sebesar 0,419 satuan, dengan asumsi variabel akses permodalan tetap. Koefisien regresi variabel akses permodalan sebesar 0,219 juga menunjukkan arah yang sama, yaitu setiap kenaikan satu satuan akses permodalan akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,219 satuan, dengan asumsi fasilitas pemerintah tetap.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel fasilitas pemerintah memperoleh nilai t hitung sebesar 4,267 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi tersebut berada jauh di bawah ambang batas 0,05, maka H1 diterima, yang berarti fasilitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IKM logam di Ngingas, Sidoarjo. Hasil serupa juga ditemukan pada variabel akses permodalan, dengan nilai t hitung sebesar 3,626 dan signifikansi kurang dari 0,001, sehingga H2 turut diterima.

Pengujian secara simultan melalui uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 21,451 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Nilai ini menunjukkan bahwa fasilitas pemerintah dan akses permodalan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IKM logam, sehingga H3 dapat diterima. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,370, yang berarti kedua variabel bebas mampu menjelaskan 37,0 persen variasi pendapatan IKM, sedangkan sisanya sebesar 63,0 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, atau strategi pemasaran yang diterapkan masing-masing pelaku usaha.

Pengaruh Fasilitas Pemerintah terhadap Pendapatan

Temuan bahwa fasilitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IKM logam di Ngingas memperkuat gagasan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan ekonomi daerah bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di lapangan. Bantuan permodalan, pelatihan keterampilan, kemudahan perizinan, hingga penyediaan sarana produksi tampaknya berhasil mendorong pelaku IKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Hasil ini sejalan dengan temuan Prasannath et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan dukungan pemerintah, baik bersifat finansial maupun non-finansial, memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha kecil dan menengah.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa besarnya koefisien pengaruh fasilitas pemerintah (0,419) yang lebih tinggi dibandingkan akses permodalan (0,219) mengindikasikan bahwa pelaku IKM logam di Ngingas relatif lebih merasakan dampak dari program-program pendampingan pemerintah dibandingkan kemudahan pembiayaan murni. Temuan ini sedikit berbeda dengan hasil Rahmah et al. (2020) di Wonosobo, di mana modal justru menjadi faktor dominan, sementara peran pemerintah hanya berfungsi sebagai moderator. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik sektor usaha yang berbeda, di mana

IKM logam membutuhkan keterampilan teknis dan pendampingan produksi yang lebih intensif dibandingkan sektor dagang atau jasa pada umumnya.

Pengaruh Akses Permodalan terhadap Pendapatan

Akses permodalan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan IKM logam, sejalan dengan temuan Ayuni et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kombinasi modal sendiri dan Kredit Usaha Rakyat secara signifikan mendorong pertumbuhan pendapatan UMKM. Kemudahan memperoleh modal usaha memungkinkan pelaku IKM logam di Ngingas untuk menambah peralatan produksi, membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar, serta memperluas kapasitas usaha sehingga mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih luas.

Temuan ini juga relevan dengan hasil Chowdhury et al. (2022) pada UKM di Bangladesh, yang menunjukkan bahwa akses pembiayaan eksternal berkontribusi positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Pada konteks IKM logam Ngingas, ketersediaan modal yang memadai tampaknya menjadi prasyarat penting agar pelaku usaha dapat keluar dari pola produksi skala kecil yang cenderung stagnan, menuju kapasitas produksi yang lebih besar dan berkelanjutan. Meski demikian, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang masih dirasakan sebagian pelaku usaha menunjukkan bahwa ruang perbaikan pada aspek ini masih cukup terbuka, khususnya dalam hal penyederhanaan persyaratan agunan dan kemudahan prosedur pengajuan kredit.

Pengaruh Simultan Fasilitas Pemerintah dan Akses Permodalan terhadap Pendapatan

Hasil uji simultan menegaskan bahwa peningkatan pendapatan IKM logam tidak dapat disandarkan pada satu faktor tunggal saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara dukungan kebijakan pemerintah dan ketersediaan modal usaha. Fasilitas pemerintah berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana produksi akan lebih optimal dampaknya apabila disertai dengan ketersediaan modal yang memadai untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program pendampingan tersebut. Sebaliknya, modal yang cukup akan lebih produktif jika pelaku usaha juga memiliki kapasitas dan pendampingan yang memadai dari program-program pemerintah.

Pola hubungan saling melengkapi ini sejalan dengan kerangka berpikir yang dikemukakan Salam dan Prathama (2022), yang menempatkan kemudahan akses permodalan sebagai salah satu faktor yang turut menentukan efektivitas fasilitas pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain, kedua variabel ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dalam mendorong pertumbuhan pendapatan IKM logam di Ngingas. Nilai koefisien determinasi sebesar 37,0 persen, meskipun tergolong moderat, cukup menggambarkan bahwa kedua faktor ini memang berperan penting, namun masih terbuka ruang bagi variabel-variabel lain seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, atau pemanfaatan teknologi digital untuk turut menjelaskan variasi pendapatan yang belum tertangkap dalam model ini, sebagaimana juga disinggung dalam kajian Choirunisa dan Mulyanti (2023) mengenai peran e-commerce dalam mendongkrak pendapatan UMKM di era digital.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fasilitas pemerintah dan akses permodalan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku IKM logam di Desa Ngingas, Sidoarjo. Fasilitas pemerintah berupa bantuan permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha, kemudahan perizinan, serta penyediaan sarana dan prasarana usaha terbukti mampu mendorong peningkatan pendapatan, dengan nilai t hitung 4,267 dan signifikansi kurang dari 0,001. Akses permodalan juga menunjukkan pengaruh yang serupa, dengan nilai t hitung 3,626 dan signifikansi kurang dari 0,001, yang menegaskan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan usaha berkontribusi nyata terhadap kapasitas produksi dan perluasan usaha pelaku IKM. Secara simultan, kedua variabel ini mampu menjelaskan 37,0 persen variasi pendapatan IKM logam, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini.

Temuan ini sekaligus menggarisbawahi bahwa peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah sebagai fasilitator sekaligus dukungan kelembagaan keuangan yang inklusif. Sinergi antara kedua pihak inilah yang pada akhirnya menentukan sejauh mana potensi ekonomi lokal, seperti sentra industri logam di Ngingas, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait. Bagi pelaku IKM logam, pemanfaatan program bantuan pemerintah secara lebih aktif dan proaktif perlu terus didorong, termasuk dalam memanfaatkan peluang pembiayaan dari lembaga keuangan formal guna mendukung pengembangan kapasitas produksi. Bagi pemerintah daerah, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperluas sosialisasi program bantuan usaha, menyederhanakan prosedur akses, serta memperkuat pendampingan teknis agar fasilitas yang disediakan benar-benar termanfaatkan secara merata oleh seluruh pelaku usaha, tidak hanya oleh sebagian kecil yang memiliki akses informasi lebih baik. Bagi lembaga keuangan, penyederhanaan persyaratan agunan dan penawaran skema pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan bagi sentra industri rumah tangga seperti di Ngingas.

Penelitian ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi catatan bagi pengembangan kajian selanjutnya. Variabel yang digunakan masih terbatas pada fasilitas pemerintah dan akses permodalan, sementara nilai koefisien determinasi sebesar 37,0 persen mengindikasikan bahwa masih terdapat porsi variasi pendapatan yang cukup besar, yakni 63,0 persen, yang belum mampu dijelaskan oleh model ini. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi relevan, seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, strategi pemasaran, maupun orientasi kewirausahaan, serta memperluas cakupan penelitian pada sektor usaha dan wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Rantung, V. P., & Marashdeh, H. (2017). Determinant of income inequality in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 159–171. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art5>
- Amalia, M. R. (2018). Studi kasus UMKM sentra batik Desa Bengle Kabupaten Tegal. *Permana*, 10(2), 248–254.
- Anita, Thantawi, T. R., & Suryani, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas UMKM terhadap produk pembiayaan di bank umum syariah. *Jurnal Sahid Banking*, 1(1), 1–12.
- Ayuni, A., Munawarah, M., Kadang, J., & Fera, F. (2025). Pengaruh modal sendiri dan KUR terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sindue. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(1), 127–141. <https://doi.org/10.35912/sakman.v5i1.4205>
- Bank Indonesia. (2023). Kajian inovasi model bisnis pembiayaan digital kepada UMKM. Bank Indonesia.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *JAF–Journal of Accounting and Finance*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Choirunisa, R., & Mulyanti, D. (2023). Literature review: Peran e-commerce dalam meningkatkan pendapatan UMKM di era new normal. *Jurnal EBI*, 5(1), 9–15. <https://doi.org/10.52061/ebi.v5i1.102>
- Chowdhury, M. A. S., Chuanmin, S., Sokolová, M., Akbar, A., Ali, Z., Ali, H., & Alam, M. Z. (2022). Assessing the empirical linkage among access to finance, firm quality, and firm performance: New insight from Bangladeshi SMEs. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 865733. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.865733>
- Jamaludin, J., & Juliansyah, H. (2020). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pendapatan perkapita Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 1–10. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3178>
- Kasmir. (2016). Analisis laporan keuangan. RajaGrafindo Persada.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). Principles of marketing (16th ed.). Pearson Education.
- Mankiw, N. G. (2018). Principles of microeconomics (8th ed.). Cengage Learning.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 593–614.
- Prasannath, V., Adhikari, R. P., Gronum, S., & Miles, M. P. (2024). Impact of government support policies on entrepreneurial orientation and SME performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 20(3), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s11365-024-00993-3>

- Rahmah, I., Kaukab, M. E., & Yuwono, W. (2020). Peran pemerintah terhadap tingkat pendapatan UMKM (Studi di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 30–50.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143.
- Sambharakreshna, Y., Kusumawati, F., & Wulandari, A. (2024). Dampak pengelolaan keuangan dengan pendekatan kebebasan finansial, teknologi keuangan, dan modal sosial terhadap pendapatan usaha. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5(2), 175–192.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Subanar, H. (2001). *Manajemen usaha kecil*. BPFE.
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi: Teori pengantar* (3rd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Umma, Z. N. (2022). Analisis pengaruh aksesibilitas permodalan, peningkatan kualitas produk dan peningkatan kualitas SDM terhadap pendapatan UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Febubhara Bharanomics*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v3i1.329>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.